KEMENTERIAN KEUANGAN RI							
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK							

YNPM8ZKH

## BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK								Final Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG									
A.1 NPWP : 15 034 620 3 722 000									
A.2 NIK :									
A.3 Nama : SAMPUN									
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG									
MASA PAJAK (mm-yyyy)		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1 B.2		B.3		B.4	B.5	B.6	B.7		
4 21-402-01		14.990.000		14.990.000	0	15	2.248.500		
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota									
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 02645/LS-TJ/RSJD.AHM/2022									
Nama Dokum			ımen E	nen Biaya Pembayaran Tanggal 0 4 dd 0 4 mm 2 0 2 2 yyyy					
в.9	PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.								
	Nomor: Tanggal dd mm yyyy								
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :									
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :									
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK   C.1 NPWP Instansi Pemerintah 9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0									
C.2 Nama Instansi Pemerintah :		لتبينا	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR						
					п п п		ПП		
	<u>-</u>		0 4 de	d 0 4 mm	2 0 2 2 yyyy			_	
C.5	Nama Penandatangan : RIANDY								
C.6 Pernyataan Wajib Pajak :				Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.					
				engan ketentuan yang sehingga tidak diperl	j berlaku, Direktorat Jenderal Paja lukan tanda tangan.	k mengatur bahwa d	dokumen ini tel	ah ditandatangani secara	